



support to indonesia's
islands of integrity program
for sulawesi

CASE STUDY 1

Provinsi Sulawesi Utara

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

Agustus 2015



CASE STUDY 1

Provinsi Sulawesi Utara

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

Agustus 2015

Cetakan Agustus 2015

Sebagian atau seluruh isi buku ini termasuk ilustrasinya boleh diperbanyak dengan syarat disebarakan secara gratis dengan mencantumkan sumbernya.

Proyek SIPS Kantor Jakarta:

Support to Indonesia's Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)
WTC 5 (Wisma Metropolitan I), 7th Floor
Jl. Jend.Sudirman Kav.29-31
Jakarta 12920
Tel: +62.21.5206207
Fax: +62.21.5206291

Proyek SIPS Kantor Makassar:

Support to Indonesia's Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)
Gedung Menara Bosowa, 14th Floor
Jl. Jend.Sudirman No.5
Makassar
Tel : +62.411 368 1205
Fax: +62.411 368 1206

Proyek SIPS Kantor Manado:

Support to Indonesia's Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)
Jl. Mangga No. 83
Sario Kotabaru
Manado 95114
Tel : +62. 431 842 896
Fax: +62. 431 854 426

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iv
Daftar Akronim	v
Sambutan Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada	vi
Sambutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	vii
Sambutan Direktur Proyek Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)	viii
Latar Belakang	1
Tantangan dan Peluang	5
Langkah – Langkah yang Telah Diambil	7
Dampak dan Perubahan	11
Pembelajaran dan Rekomendasi	13
Keberlanjutan Reformasi	15
"Apa Kata Mereka" – Staff Pemerintah, LSM, Masyarakat	17
Langkah-Langkah Menuju Replikasi	21

DAFTAR AKRONIM

AMDAL	Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
BIMTEK	Bimbingan Teknis
BP2TPM	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
DFATD	Department of Foreign Affairs, Trade and Development
DISDUKCAPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
FGD	Focus Group Discussion
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat
INPRES	Instruksi Presiden
KEPRES	Keputusan Presiden
KKN	Korupsi Kolusi Nepotisme
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUA	Kantor Urusan Agama
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MOU	Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman)
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
PBJ	Pengadaan Barang dan Jasa
PEMDA	Pemerintah Daerah
PERBUP	Peraturan Bupati
PERDA	Peraturan Daerah
PERPRES	Peraturan Presiden
PIRT	Pangan Industri Rumah Tangga
POKJA	Kelompok Kerja
PSC	Project Steering Committee
SDM	Sumber Daya Manusia
SIPS	Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi
SKPD	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SOP	Standard Operational Procedure (Prosedur Standar Operasional)
SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik
SULSEL	Sulawesi Selatan
SULUT	Sulawesi Utara
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
ULP	Unit Layanan Pengadaan

Sambutan

Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada



Jeffrey Ong

Senior Development
Officer

Embassy of Canada
in Indonesia

Atas nama Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) Kanada, adalah suatu kehormatan bagi saya untuk berbagi studi kasus mengenai Pencegahan Korupsi, untuk kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya; khususnya, lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam pencegahan korupsi.

Studi – Studi Kasus telah diproduksi sebagai salah satu hasil utama dari kemitraan antara DFATD Kanada dengan KPK, melalui proyek SIPS, di bawah fokus tematik pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di bawah Program Kerjasama Pembangunan Indonesia - Kanada, melalui pengalaman pelaksanaan proyek 10 pemerintah lokal di Sulawesi selama 3 tahun terakhir.

Adalah keyakinan kami bahwa untuk mensukseskan pencegahan korupsi, perlu adanya keterlibatan yang lebih luas dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Dengan demikian, sangat penting untuk berbagi pelajaran dan praktik cerdas yang disajikan dalam Studi Kasus. Kami berharap bahwa sebagai hasil dari berbagi Studi Kasus kepada para pemangku kepentingan yang lebih luas, bisa ada kesadaran yang lebih baik dan apresiasi terhadap isu-isu dan tantangan di sekitar pencegahan korupsi, serta penyediaan pilihan untuk mengatasi pencegahan korupsi dengan mereplikasi praktik – praktik cerdas.

Sambutan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga berbagai upaya yang kita lakukan bersama untuk membangun bangsa, khususnya dalam bidang pemberantasan korupsi, telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup membanggakan.

Menyadari pentingnya upaya pencegahan korupsi untuk menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas dan sejahtera, maka dibutuhkan upaya serius dari semua pihak untuk menyebarluaskan pengalaman dan praktik-praktik terbaik di bidang pelayanan publik ke seluruh penyelenggara pelayanan publik.

KPK mencatat bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah, administrasi kependudukan serta pelayanan perijinan merupakan kegiatan-kegiatan yang paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi, yang telah menjerat penyelenggara

negara di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, maka reformasi layanan publik di ketiga sektor tersebut diharapkan akan mengurangi peluang dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Buku Studi Kasus Pelayanan Publik merupakan dokumentasi dari reformasi layanan publik pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, layanan administrasi kependudukan, serta pelayanan perijinan terpadu yang dilakukan sejak tahun 2011 oleh Proyek SIPS (Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi) sebagai bentuk kerjasama antara KPK dengan Pemerintah Kanada melalui DFATD (Department of Foreign Affairs, Trade, and Development).

Dari dokumentasi ini dapat dipelajari berbagai tahap yang dilakukan, hambatan yang ditemui, solusi yang diambil, serta perbaikan yang dicapai oleh 10



Adnan Pandu Praja



Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi

Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan dengan kondisi awal yang berbeda-beda agar dapat dijadikan referensi, mudah diikuti dan ditiru oleh pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Harapan saya semoga buku ini bermanfaat dalam menjalankan reformasi pelayanan publik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, serta mengurangi peluang dan mencegah terjadinya korupsi. Mari kita bekerja demi terwujudnya Indonesia yang bebas korupsi.

Sambutan

Direktur Proyek Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)



Peter F. Walton

Direktur Proyek SIPS

Proyek SIPS sangat senang secara resmi meluncurkan publikasi resmi pertama proyek: 10 studi kasus dari perbaikan pelayanan publik di mitra pemerintah daerah kami.

SIPS atau **Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi** merupakan proyek bilateral yang didanai oleh Department of Foreign Affairs, Trade, and Development Canada (DFATD, sebelumnya CIDA). Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK) adalah mitra dalam proyek ini. Cowater International Inc. terpilih melalui proses yang kompetitif pada bulan Desember 2009 sebagai konsultan pelaksana proyek SIPS.

Mandat SIPS sehubungan dengan pemerintah daerah di Sulawesi adalah "untuk mengurangi peluang korupsi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi

pelayanan publik terpilih, khususnya Kependudukan dan Catatan Sipil, PTSP dan PBJ". SIPS bekerja dengan 10 pemerintah daerah di Sulawesi, termasuk lima di Provinsi Sulawesi Utara (Provinsi Sulut, Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Kepulauan Sangihe) dan lima di Sulawesi Selatan (Provinsi Sulsel, Kota Makassar, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Tana Toraja). SIPS bekerja dengan perwakilan masyarakat sipil dan pemerintah dalam upaya menjembatani kesenjangan antara masyarakat sipil dan pemerintah untuk memajukan kepentingan bersama dalam meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi korupsi.

Kami juga mendukung KPK untuk memperkuat mandatnya dalam bidang pencegahan dan meningkatkan kesadaran

diantara para pemangku kepentingan Indonesia dan masyarakat luas mengenai upaya - upaya anti-korupsi. Selain itu kami bekerjasama dengan banyak lembaga nasional termasuk Kemendagri, LKPP, Kemenpan Reformasi Birokrasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Ombudsman RI dan Bappenas untuk memastikan bahwa upaya kami bekerja di dalam dan mendukung keseluruhan kerangka peraturan perundang-undangan pemerintah.

Bermitra dengan KPK, SIPS mentargetkan perubahan kelembagaan. Bantuan teknis merupakan salah satu bagian dari ini. Bagian terbesar yang sulit adalah mengubah paradigma, mengubah pola pikir kita untuk melihat peran pemerintah sebagai salah satu layanan dan mencoba menghidupkan kepercayaan bahwa tempat-tempat umum di dalam kita untuk

melayani masyarakat yang sama dengan cara yang jujur, transparan, dan kompeten.

Pola pikir, pergeseran paradigma atau, seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo "revolusi mental", merupakan pergeseran ke cara yang berbeda dalam melakukan bisnis, bukan bisnis seperti biasanya. Untuk berpindah dari pemerintahan ke orientasi pelayanan dan untuk lebih memahami hubungan antara korupsi dan pelayanan publik dan bagaimana korupsi melemahkan kita, ini adalah tantangan nyata yang kini kita hadapi.

Masing-masing dari 10 studi kasus ini menyoroti upaya setiap pemerintah sub-nasional untuk mencoba membuat perbedaan dalam kehidupan masyarakat, memperlakukan mereka dengan hormat, mematahkan budaya hak pemerintah dan bergeser

ke pelayanan publik yang baik dan benar.

Mudah-mudahan kita bisa menyepakati perlunya perubahan dan cara-cara untuk mewujudkannya. Pada akhirnya ini adalah tentang komitmen masing-masing untuk memegang janji pejabat terpilih dan staf pemerintah untuk bertanggung jawab atas janji mereka dan untuk mencontohi standar integritas dan kejujuran yang sama yang kita harapkan dari para pemimpin kita.



LPSE

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

PROVINSI SULAWESI UTARA



LATAR BELAKANG

SIPS, atau *Proyek Dukungan bagi Program Kepulauan Indonesia Berintegritas untuk Sulawesi (Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi)* didanai oleh Pemerintah Kanada melalui Departemen Luar Negeri, Perdagangan dan Pembangunan Kanada [Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada (DFATD Canada)]. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan pihak dari Indonesia yang menjadi rekanan dalam proyek ini. Cowater International Inc. terpilih melalui proses yang kompetitif di bulan Desember 2009 untuk menyediakan layanan konsultasi dan implementasi proyek SIPS.

Proyek ini memiliki dua tujuan luas. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi, mengimplementasi dan menunjukkan praktik-praktik pencegahan korupsi yang lebih baik, sehubungan dengan upaya memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua adalah untuk memperkuat peran KPK sebagai katalis dan mentor bagi inisiatif-inisiatif pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan sub-nasional. Secara keseluruhan, proyek ini akan berkontribusi kepada pengurangan korupsi melalui tata kelola pemerintahan dan praktik-praktik manajemen yang transparan dan akuntabel.

SIPS memiliki tiga hasil utama yang langsung terlihat: (1) praktik-praktik dan sistem-sistem yang lebih transparan dan akuntabel di tingkat pemerintahan sub-nasional (provinsi dan kabupaten/kota) yang terpilih; (2) kapasitas KPK yang diperkuat untuk mempengaruhi terjadinya perubahan di dalam pemerintahan daerah, dan (3) lingkungan yang lebih mendukung bagi berkurangnya korupsi melalui peningkatan kesadaran akan strategi-strategi pencegahan korupsi dan praktik-praktiknya. Tujuh puluh lima persen dari upaya proyek ini akan berfokus pada upaya peningkatan kapasitas pemerintahan di tingkat sub-nasional. Sisanya 25% dibagi antara pembangunan kapasitas KPK (15%) dan pendokumentasian dan diseminasi praktik-praktik terbaik dan pembelajaran dari semua kegiatan proyek (10%).

SIPS mendukung 10 pemerintah sub-nasional¹ di Sulawesi dan KPK melalui peran mereka masing-masing dalam memperkenalkan reformasi kunci tata kelola pemerintahan. Peran Cowater International Inc. adalah untuk mengelola proyek dalam kolaborasi erat dengan KPK. Pendekatan ini memerlukan rancangan dan penerapan metode dan alat-alat dengan cara yang berulang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi cara-cara yang paling efektif untuk memperkenalkan dan mempertahankan berbagai reformasi tata kelola pemerintahan. Mendokumentasikan dan mensistematiskan praktek yang paling sukses di pemerintah daerah yang berpartisipasi akan melengkapi KPK dengan alat-alat yang efektif dan strategi-strategi untuk memperluas praktik terbaik untuk pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Melalui pendekatan yang diambil oleh SIPS diakui bahwa keberlanjutan jangka panjang dari hasil proyek akan tergantung pada keberhasilan dalam pembangunan kapasitas dari beberapa mitra yang berbeda:

- Memperkuat kapasitas internal KPK untuk mengkatalisasikan reformasi tata kelola pemerintahan di tingkat sub-nasional dan terutama dalam Penelitian dan Pengembangan Direktorat Divisi Pencegahan;
- Bekerjasama dengan instansi pemerintah nasional yang relevan dalam mendukung kepatuhan pemerintah daerah terhadap hukum dan peraturan;
- Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah daerah dan tim dalam melaksanakan dan mempertahankan reformasi pemerintahan; dan,
- Mendorong OMS regional dan lokal untuk berpartisipasi dalam musyawarah kebijakan dan perumusan dan pengawasan masyarakat dalam kaitannya dengan rencana aksi pencegahan korupsi.

Penyiapan strategi, materi dan pelatihan dilakukan dengan menggabungkan metode perubahan manajemen dan pendekatan-pendekatannya. SIPS menambah nilai dengan menyusun inovasi yang diusulkan dalam proses perubahan adaptif dan dengan melibatkan para ahli teknis, baik nasional maupun internasional, yang berpengalaman di berbagai prinsip dan teknik perubahan manajemen.

¹ Provinsi SULSEL, Kota MAKASSAR, Kab ENREKANG, Kab PINRANG, Kab TANA TORAJA, Provinsi SULUT, Kota MANADO, Kab MINAHASA, Kota BITUNG, Kab Kepulauan SANGIHE

Kemitraan dengan KPK

SIPS dilaksanakan berdasarkan kemitraan yang kolaboratif dengan KPK dan melibatkan KPK dalam penilaian kebutuhan pengembangan kapasitas untuk mendukung kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Dukungan teknis diberikan dalam bentuk pengembangan, implementasi, dan pemantauan rencana aksi. Keterlibatan proaktif ini adalah elemen yang penting dalam memastikan kemitraan dan kepemilikan dari pihak Indonesia.

Kemitraan dengan KPK diharapkan menjadi sangat dekat, dengan KPK memainkan peran penting dalam menentukan dan membimbing proyek melalui konsultasi dan hubungan dengan semua Gugus Tugas, juga melalui Komite Pengarah Proyek (Project Steering Committee). Cowater juga melibatkan KPK dalam pemilihan ahli teknis yang diperlukan dalam rangka membangun kepemilikan dan untuk menerapkan dan mendemonstrasikan praktik-praktik perekrutan yang transparan.

Integrasi Lintas Isu

SIPS berkomitmen mendukung mitra-mitranya yaitu pemerintah, KPK dan organisasi masyarakat sipil untuk mengintegrasikan kesetaraan jender dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan dan peraturan pemerintah Indonesia. Pengarusutamaan jender dilakukan dengan menganalisa kesenjangan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki, dan memastikan bahwa pembangunan dan program pemerintah memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, dalam pengembangannya proyek SIPS juga berinisiasi untuk membangun kesadaran terkait isu lingkungan yang saat ini menjadi masalah pengarusutamaan (*mainstreaming issue*). Isu lingkungan menjadi hal yang sangat penting terutama dalam pengadaan barang dan jasa dan juga menjadi landasan dalam proses perizinan usaha.





TANTANGAN DAN PELUANG

Kondisi awal LPSE Provinsi Sulawesi Utara setelah terbentuk banyak menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek penataan ruangan (layout) yang belum tertata baik, belum dibatasinya akses ke ruangan khusus staff LPSE dan penyedia layanan belum dapat memberikan kenyamanan kepada *vendor* (penyedia barang/jasa atau peserta pengadaan). Dari aspek sumberdaya manusia, pengetahuan dan kapasitas staff LPSE masih terbatas pada hal-hal yang mendasar terkait pengadaan Barang dan Jasa.

Selain kondisi di atas, LPSE juga menghadapi tantangan lain. Organisasi/ kelembagaan LPSE Provinsi Sulawesi Utara awalnya hanya sebagai tim *ad hoc* (dibentuk sementara untuk suatu tugas tertentu) sehingga staff yang ditunjuk melalui SK Gubernur memiliki tugas rangkap yaitu tugas utama dan tugas sebagai tim *ad hoc*. Kapasitas SDM LPSE juga sangat terpengaruh dengan adanya perpindahan, mutasi, dan tugas luar instansi dari staff yang telah dilatih.

Biaya akses internet masih terbatas dan mahal sehingga penyedia / *vendor* yang tidak memiliki akses internet harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk mengunggah dokumen penawaran ke sistem internet. Hal ini diperburuk dengan adanya kebiasaan *vendor* untuk mengirimkan penawaran di jam dan menit terakhir dari batas pemasukan proposal penawaran. Kondisi tersebut menyebabkan potensi kegagalan transfer data sangat besar. Masih banyak *vendor* yang belum terbiasa dengan proses pengadaan secara elektronik, Menyikapi hal tersebut, LPSE menjadwalkan waktu pelatihan pengadaan barang secara elektronik namun terkendala dengan waktu peserta yang sering tidak sesuai dengan jadwal pelatihan. LPSE Provinsi juga memiliki kewajiban lain, yaitu melayani *vendor* dari Kabupaten/Kota yang belum memiliki LPSE, melalui dukungan untuk produk hukum dan peningkatan kapasitas SDM. Kendala lainnya yaitu proses penawaran yang beberapa kali menetapkan indikator syarat yang tidak relevan dengan kemampuan teknis. Sedangkan untuk pelayanan optimal masih terkendala dengan terbatasnya tenaga listrik.

Adapun peluang dalam melaksanakan reformasi di LPSE Sulawesi Utara adalah komitmen dari pemerintah setempat yang sangat tinggi dalam melakukan reformasi dalam sistem pelayanan pengadaan secara elektronik.

UMUM PENGADAAN (RUP)
RTA PELATIHAN APLIKASI
N (SIRUP)
MANADO, 10 - 13





LANGKAH-LANGKAH YANG SUDAH DIAMBIL

Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan dan mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik maka dibentuklah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi. Fungsi LPSE menjadi tugas pokok dan fungsi Bidang Administrasi Pembangunan di Biro Pembangunan Sekretariat Daerah. Dengan demikian, staff yang ditunjuk/diangkat, memiliki tugas pokok dan fungsi utama sebagai staff LPSE. Hal ini juga memberikan peluang untuk memberdayakan sumber daya internal (SDM) internal Biro Pembangunan.

Langkah - langkah yang telah diambil antara lain melakukan penataan ruangan (layout) LPSE yang lebih baik dengan mengubah/mengganti penampilan, tata letak dan perabotan kantor, memperbaiki tata letak ruangan dengan membatasi akses *vendor* dan pengunjung lainnya masuk ke ruangan staff LPSE (kantor belakang), menyediakan ruangan untuk pelatihan serta memasang CCTV untuk monitoring pimpinan terhadap kinerja pelayanan LPSE. Dengan memisahkan kantor depan dan kantor belakang, *vendor* hanya bisa masuk ke ruang kantor depan untuk mengunggah dokumen penawaran menggunakan internet, atau masuk di ruang pelatihan jika ada pelatihan untuk *vendor*. Penataan kantor depan dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna LPSE, sehingga akan menarik *vendor* datang ke Kantor LPSE.

Peningkatan kapasitas sumberdaya dilakukan dengan mengikutsertakan pimpinan dan staff LPSE melalui pelatihan - pelatihan seperti Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa, Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, Metode Evaluasi Penyedia dan Dokumen Penawaran, dan lain-lain.

CASE STUDY 1



Keterbatasan kemampuan *vendor* dalam menggunakan LPSE disiasati dengan memberikan pelatihan kepada *vendor* termasuk *vendor* perempuan. Selain pelatihan, staff LPSE juga melakukan pendampingan langsung pada saat *vendor* melakukan pendaftaran. Untuk menunjang kinerja LPSE dilakukan peningkatan kapasitas bandwidth internet menjadi 16Mbps untuk melancarkan pelayanan terutama memudahkan *vendor* dalam mengunggah dan mengunduh dalam mengunggah dan mengunduh dokumen penawaran menggunakan internet.

Selain itu juga dilakukan sosialisasi terkait keberadaan dan penggunaan LPSE ke Internal Biro, SKPD dan *Vendor* (Penyedia Barang/Jasa), termasuk kepada pengusaha wanita, dan memfasilitasi pembentukan LPSE di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Langkah yang tidak kalah pentingnya yang telah diambil adalah pertukaran pengetahuan (pembelajaran) dengan pihak lain. Pertukaran dilakukan selain antar sesama kantor LPSE di Provinsi Sulawesi Utara, juga dengan daerah lain seperti Bandung.



TUTUP
CLOSED

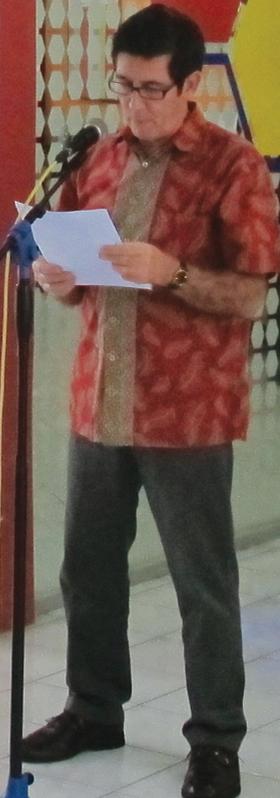
KPK



Foreign Affairs, Trade and
Development Canada

Affaires étrangères, Commerce
et Développement Canada

cowc



LPS
Layanan Pengadaan Secara
PROVINSI SULAWESI



DAMPAK DAN PERUBAHAN

Ada dua perubahan penting yang terjadi setelah Implementasi Rencana Aksi yang dilakukan LPSE Pemerintah Provinsi Sulut, yaitu:

- Adanya peningkatan pengetahuan dan pelayanan SDM
LPSE saat ini sudah memiliki kapasitas yang jauh lebih baik karena sudah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang lengkap untuk memenuhi standar pelayanan yang berkualitas, terutama terkait dengan pemahaman anti-korupsi.
- Adanya peningkatan infrastruktur yang merupakan aspek yang penting dalam upaya mendukung pelayanan yang lebih optimal. Perubahan fisik terlihat pada penataan ruangan yang semakin nyaman melalui pemisahan kantor depan dengan kantor belakang untuk meminimalisir potensi KKN. Penataan alur proses dari kantor depan juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur dalam SOP. Dari segi kenyamanan beraktifitas, ruang tunggu pelanggan dirancang nyaman mungkin untuk memfasilitasi *vendor* yang datang ke Kantor LPSE.





PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

Peningkatan kapasitas staf LPSE harus berbanding lurus dengan pelayanan kepada *vendor*, sehingga pelayanan semakin baik dan keluhan semakin berkurang. Pemisahan kantor depan dan kantor belakang merupakan suatu keharusan untuk membatasi akses *vendor* ke ruang staf, atau jika membutuhkan pendampingan akan dilayani di kantor depan, bukan di kantor belakang. Salah satu aspek keterbatasan dipihak *vendor* adalah bagaimana menggunakan perangkat, terutama aplikasi SPSE, sehingga masih dibutuhkan pelatihan-pelatihan untuk *vendor* baik laki-laki maupun perempuan.

Pihak LPSE diharapkan komitmennya untuk selalu memperbaiki infrastruktur dan teknologi serta meningkatkan kinerja pelayanan sehingga dapat melayani pelanggan atau pengguna layanan dengan lebih baik lagi.





KEBERLANJUTAN REFORMASI

Upaya – upaya yang perlu dilakukan dalam mempertahankan dan meningkatkan pelayanan Kantor LPSE Provinsi Sulawesi Utara, antara lain:

- Kemauan politik, kepemimpinan, dan dukungan dari semua aktor yang terlibat dalam proses pembangunan.
- Membangun jaringan dengan mitra strategis (LKPP, ULP, mitra bisnis) untuk mendukung pelaksanaan program.
- Pembangunan kapasitas yang berkelanjutan untuk pemerintah daerah dan mitra strategis.
- Strategi pembentukan Gugus Tugas dan Pokja yang akan mengambil alih keberlanjutan program.
- Kewajiban pejabat dan staff dalam menyebarkan pengetahuan yang diperoleh sehingga menjadi pengetahuan bersama.
- Kecuali untuk promosi, mutasi atau perpindahan pegawai sebaiknya dihindarkan karena hal itu akan melemahkan SDM, terlebih SDM yang baru dilatih untuk memenuhi kebutuhan LPSE.
- Peningkatan status kelembagaan dari Unit (*Ad-hoc*) menjadi Kantor (struktural/berdiri sendiri).





"APA KATA MEREKA"

Staff Pemerintah, LSM, Masyarakat

“ (Bpk. Novy Kainde, Kepala LPSE Provinsi Sulawesi Utara)

“LPSE Provinsi saat ini lebih “qualified dan berpenampilan”, dan ini sesuai dengan indikator pelayanan prima. Layanan yang diberikan sudah sangat mendukung proses pengadaan barang dan jasa, baik untuk pihak pemberi layanan (LPSE) maupun untuk pihak penerima layanan (Vendor). Juga sikap dan pengetahuan dari staff LPSE (contohnya bagian administrasi) sudah menunjukkan profesionalisme yang sesuai dengan kebutuhan dari vendor, yang berasal dari dunia bisnis. Ruangannya LPSE sebelumnya tidak ada pembatas, sehingga vendor bisa berkomunikasi langsung dengan pengelola (Back Office), sehingga rawan terjadi transaksi-transaksi diluar SOP. Sekarang, interior dan juga exterior ruangannya sudah sangat representative”

“ (Bpk. Jimmy Thomas, LPSE Provinsi Sulawesi Utara)

“Fasilitas LPSE sekarang lebih nyaman dan memberikan pelayanan yang baik, sehingga ada vendor dari Kabupaten dan Kota lebih memilih untuk menggunakan layanan LPSE Provinsi. Dengan fasilitas layanan seperti ini, secara tidak langsung, membatasi ataupun menghilangkan maksud-maksud vendor yang tidak sesuai prosedur. Juga, sikap profesional staff LPSE membuat vendor tidak merasa terbebani untuk menggunakan fasilitas ini”

“ (Viane Raintung, verifikator LPSE Provinsi Sulawesi Utara)

“Saat ini SDM yang dimiliki oleh LPSE Provinsi sudah lumayan bagus, sebagai hasil dari pelatihan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh SIPS. Salah satu yang paling berpengaruh adalah hasil magang tim LPSE Provinsi di LPSE Provinsi Jawa Barat. Pengalaman ini sangat membantu meningkatkan pemahaman dan lingkup kerja yang ideal bagi staff LPSE. Selain terjadi peningkatan kapasitas, infrastruktur atau fasilitas yang dimiliki oleh LPSE Provinsi terkini, memberikan kenyamanan bekerja untuk staf yang tentunya membantu menghasilkan pelayanan yang baik, contohnya adalah dengan tersedianya jaringan internet yang cepat. Selain itu, penantaan ruangan yang sangat baik membantu staf untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi para vendor. Tersedianya ruang bidding dan ruangan pelatihan yang terpisah membantu staf memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sasaran”

“ (Joun Ewa Rombot, vendor / penyedia Barang dan Jasa)

“Penataan Kantor LPSE Provinsi sudah sangat baik dan “cantik”, letak dan pengaturan ruangnya memberikan kenyamanan dan keleluasaan bagi pengguna (vendor) untuk menggunakan fasilitas LPSE. Dulunya sempit dan tidak teratur, saat ini ruang depannya lumayan luas, ruangan training sudah tersedia dan staff yang memberikan pelayanan sangat ramah. Terkait koneksi Internet, koneksi yang dimiliki LPSE Provinsi sangat cepat, kami sangat terbantu jika akan mengupload dokumen dengan kapasitas yang besar dan sulit dilakukan ditempat sendiri”

IAN

ARA ELEKTRONIK
RA

sips

support to Indonesia's
islands of integrity program
for Sulawesi

COU
INTERNAT

BOVY JAMES HARDE







LANGKAH-LANGKAH MENUJU REPLIKASI

Langkah – langkah menuju replikasi dapat dibagi ke dalam dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap replikasi.

Langkah – langkah yang dibutuhkan selama tahap persiapan adalah:

- Penilaian mengenai inovasi apa yang akan direplikasi
- Penilaian situasi
- Perlibatan pemangku kepentingan
- Membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses replikasi inovasi

Langkah – langkah yang diperlukan selama tahap replikasi:

- Membentuk Gugus Tugas dan Kelompok Kerja untuk mengimplementasikan dan memonitoring replikasi
- Membangun rencana kerja untuk mereplikasi inovasi
- Membangun kapasitas melalui pelatihan, magang, dan sebagainya untuk para pelaksana replikasi
- Memonitoring perkembangan
- Memastikan keberlanjutan



PROVINSI SULAWESI UTARA





Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)

Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) is a 5 year DFATD project, implemented by Cowater, designed to reduce opportunities for corruption in 10 sub-national governments in Sulawesi through increased implementation of transparent and accountable practices. The Project is also providing assistance to the Indonesia Corruption Eradication Commission (KPK) to help strengthen its role in corruption prevention.

For more information visit

www.sips.or.id
www.cowater.com

**Support to Indonesia's Island of
Integrity Program for Sulawesi (SIPS)**
WTC 5 (Wisma Metropolitan I), 7th Floor
Jl. Jend.Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Tel: +62.21.5206207 Fax: +62.21.5206291